

126 PEJABAT ESELON III DAN IV DILANTIK

Profesional, Jadi Punggawa Peradaban yang Tangguh

YOGYA (KR) - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan proses regenerasi sumber daya manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa, proses leadership estafet di Pemda DIY dijalankan dengan baik. Untuk itu para pejabat yang dilantik diharapkan sebagai *middle manager* yang memiliki karakter-karakter tertentu.

Karakter yang dimaksud ialah nyaman dengan perubahan, bersemangat dalam mencapai tujuan dengan manajemen risiko yang baik, teliti, menerapkan model manajemen partisipatif dan bijak dalam mengelola kegiatan. "Jangan lupa, selalu jaga entitas dan jadikan pemimpin yang ideal, dengan berbekal prinsip, *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Jadilah punggawa peradaban yang tangguh, profesional dan tetap berbudaya demi mewujudkan DIY

yang sejahtera dan bermartabat," kata Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X saat melantik 126 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemda DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Senin (14/9). Sebanyak 126 pejabat eselon III dan IV yang dilantik tersebut terdiri dari 34 PNS pejabat administrator dan 92 PNS pejabat pengawas. Sedangkan Kepala BKD DIY Amin Purwani menyatakan, pelantikan pejabat eselon III dan IV dilakukan di empat titik dengan me-

ngedepankan protokol kesehatan yang ada. Keempat lokasi tersebut dengan perincian Gedhong Pracimasana sebanyak 13 peserta, Radyo Suyoso 43 peserta, unit 9 sebanyak 30 peserta dan unit 8 ada 30 peserta. "Tahun ini jumlah PNS yang pensiun ada 800 orang dari mulai pelaksanaan, pengawas, administrator, sampai JPT termasuk fungsional. Saya berharap dengan adanya pelantikan ini mereka bisa bekerja lebih baik dari yang sebelumnya sehingga bisa memberikan karya

terbaik," ungkap Amin.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikannya hampir semua jabatan baik eselon III maupun eselon IV A dan IV B di lingkungan Pemda DIY yang kosong sudah terisi semua sampai dengan Agustus 2020. Harapannya dengan terisinya jabatan struktural tersebut maka manajemen kelembagaan tersebut menjadi lengkap sehingga hambatan pekerjaan bisa lebih dikurangi. "Selain itu, dengan terisinya jabatan administrator atau eselon III dan jabatan pengawas atau eselon IV di lingkungan Pemda DIY ini bisa membuat capaian kinerja di instansi masing-masing bisa menjadi lebih baik," imbuh Baskara Aji. (Ria/Ira)-d



KR-Franz Boedisokamanto

Wagub DIY Paku Alam X melantik dan pengambilan sumpah jabatan eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemda DIY sesuai protokol kesehatan di Gedhong Pracimasana Kepatihan.

REVITALISASI TROTOAR JALAN KH AHMAD DAHLAN Waktu 'Mepet', Dikerjakan Siang-Malam

YOGYA (KR) - Salah satu proyek fisik skala besar yang sudah dilakukan Pemkot Yogya ialah revitalisasi trotoar di Jalan KH Ahmad Dahlan. Ketersediaan waktu yang *mepet* membuat pekerjaan tersebut harus dikerjakan siang dan malam.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Umi Akhsanti, menjelaskan durasi pekerjaan sesuai kontrak ialah 100 hari.

"Untukantisipasi supaya waktu yang *mepet* ada beberapa langkah. Salah satunya pekerjaan dilaksanakan shift siang dan malam," jelasnya, Senin (14/9).

Selain itu, kesiapan material sudah dipastikan sebelum penandatanganan kontrak. Sehingga pihak ketiga bisa lebih fokus pada teknis pekerjaan. Di samping itu, pekerjaan juga dibagi dalam dua segmen dengan dua kelompok pekerja.

Meski ruas trotoar di sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan cukup panjang namun pekerjaan tahun ini sesuai perencanaan memang belum dituntaskan 100 persen. Pekerjaan di tahun ini hanya sampai penggantian lantai teraso seperti yang ada di kawasan Titik Nol Kilometer. Oleh karena itu fokus pekerjaan di sana ialah menyempurnakan utilitas di bawahnya, seperti penataan

saluran limbah serta membuat *ducting* untuk serat kabel optik.

"Kemudian untuk saluran limbah juga disempurnakan supaya kalau ada warga di sana yang hendak menyambung, tidak perlu membongkar trotoar," urainya.

Sedangkan untuk tamanisasi dan *street furniture*, dilanjutkan tahun depan. Pekerjaan di Jalan KH Ahmad Dahlan juga tidak akan menambah luasan trotoar karena lebarnya saat ini sudah sesuai. Terkait keberadaan PKL di sana masih menunggu kebijakan Pemkot apakah kelak tetap diperbolehkan berjualan kembali atau tidak.

Camat Ngampilan Drs Tur Arya Warih, mengaku di wilayahnya terdapat empat PKL yang terdampak dari revitalisasi trotoar di Jalan KH Ahmad Dahlan sisi selatan. Surat izin yang ia berikan juga sudah tidak diperpanjang. Sedangkan pembinaannya dikoordinasikan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sementara proyek fisik skala besar lainnya yang dikerjakan ialah pembangunan saluran air hujan (SAH) di Jalan Kemasan, revitalisasi trotoar Jalan Jenderal Sudirman tahap II dan penataan kawasan Tugu Pal Putih. Akan tetapi yang sudah siap dikerjakan baru SAH di Jalan Kemasan, sedangkan dua pekerjaan lain masih proses kontrak. (Dhi)-d

GUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI, CEGAH MANIPULASI Pendataan KSJPS 2021 Sasar 23.758 KK

YOGYA (KR) - Dalam waktu dekat Dinas Sosial Kota Yogya akan menerjunkan petugas untuk melakukan pendataan calon Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2021. Total ada 23.758 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi sasaran pendataan.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Agus Sudrajat, mengungkapkan warga yang menjadi sasaran pendataan tersebut merupakan penerima program KSPJS tahun ini ditambah usulan dari wilayah. "Sebelum ada pandemi Covid-19, usulan warga mencapai sekitar 4.000 KK. Tetapi sekarang naik menjadi 9.339 KK. Sedangkan penerima program KSJPS tahun ini ada 14.359 KK. Dengan begitu yang akan kami data untuk program tahun depan mencapai 23.758 KK," jelasnya, Senin (14/9).

Bagi penerima program KSJPS akan dibekali Kartu Menuju Sehat (KMS) dari Pemkot Yogya. Sejumlah program afirmatif yang diberikan an-

tara lain santunan kematian jika ada anggota keluarganya meninggal dunia, kuota sekolah negeri, jaminan kesehatan serta prioritas bantuan pemberdayaan.

Agus mengaku, pendataan KSJPS selalu rutin dilakukan setiap tahun. Tahapan yang akan segera dilaksanakan ialah terjun ke lapangan untuk memverifikasi atau mencocokkan data hasil masukan warga dengan kondisi faktual.

"Pertengahan bulan ini petugas akan survei ke lapangan. Data yang sudah

didapat, akan dicocokkan kebenarannya meliputi kondisi rumah, anggota keluarga dan lainnya," imbuhnya.

Mulai tahun ini proses pendataan tersebut sudah menggunakan aplikasi atau teknologi informasi berbasis android. Tiap kelurahan diterjunkan lima orang petugas serta bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Petugas lapangan juga telah melakukan simulasi penggunaan teknologi informasi.

Sehingga ketika melakukan survei, petugas akan mengabadikan foto setiap indikator dengan kondisi aslinya kemudian mengunggah ke dalam aplikasi.

Dengan pemanfaatan aplikasi tersebut maka validitasnya semakin terjaga serta menutup celah manipulasi data. Jika ada warga yang meragukan hasil pendataan, maka data visual yang tersimpan dalam aplikasi bisa dibuka kembali. Sehingga keraguan terhadap kualitas jaga dipastikan akan terjamin. (Dhi)-d

PENGUMUMAN LELANG Nomor : 10179/HT 0102

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, akan melaksanakan Lelang Sukarela dengan penawaran melalui internet (*closed bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang terhadap Barang Milik PT Bank BPD DIY berupa :

No	Jenis Barang	Warna	Tahun Pembuatan	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Keterangan
1	Kijang LGX-7ke AB 8617 H	Biru Metalik	2000	7K-0388691	MHF11KF83Y0029732	AB 8617 H	42.000.000,00	21.000.000,00	STNK & BPKB ada
2	1 Paket Inventaris, terdiri dari Mesin, Mebelair, Komputer, dan Inventaris Lainnya	-	-	-	-	-	11.393.300,00	2.848.325,00	-

Waktu melihat barang pada :
Tanggal : 15 September 2019 s.d. 22 September 2020 (kecuali Sabtu & Minggu)
Jam : 09.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Halaman Belakang Gedung BPD Syariah, Jl. Magelang Km.5 Sinduadi, Mlati, Sleman

Lelang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2020
Batas Akhir Penawaran : 14.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : PT Bank BPD DIY Kantor Pusat Jl. Tentara Pelajar No.7 Yogyakarta

- Syarat dan Ketentuan Lelang :
- Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan melalui internet (*closed bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu "Syarat dan Ketentuan" dan calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada domain tersebut.
 - Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy (scan) KTP, NPWP, Nomor handphone dan nomor rekening atas nama sendiri.
 - Waktu Pelaksanaan Lelang
a) Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Rabu, 23 September 2020 pukul 13.59 Waktu Server (sesuai WIB)
b) Penetapan pemenang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari Rabu, 23 September 2020 pukul 14.00 Waktu Server (WIB) bertempat di Kantor Pusat PT Bank BPD DIY, Jl. Tentara Pelajar No.7 Yogyakarta.
c) Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
 - Uang Jaminan Penawaran Lelang
a) Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah nominal yang disetorkan HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicitil).
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (Selasa, tanggal 22 September 2020).
 - Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dibagikan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
 - Pengembalian uang jaminan:
1. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
2. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
 - Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
 - Obyek Lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
 - Karena suatu dan lain hal pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penuhataan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun terhadap penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
 - Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat. Ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang.
 - Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang setelah pengumuman ini terbit. Informasi lebih lanjut hubungi Kantor Pusat PT Bank BPD DIY Telp (0274) 561614 ext. 125 atau KPKNL Yogyakarta (0274) 544091.

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

KEMBALIKAN NUANSA YOGYA 'AYEM'

Penegakan Aturan Harus Ekstra

YOGYA (KR) - Temuan kasus Covid-19 di Kota Yogya dinilai sudah seperti 'hantu' hingga menjadikan kota ini tidak lagi *ayem*. Hal ini karena tambahan kasus positif yang cukup pesat, klaster baru bermunculan, ditemukannya mutasi virus dengan kecepatan penularan yang semakin melesat dan lainnya. Penegakan aturan yang terkait protokol pun harus ekstra agar Yogya tidak semakin mencekam.

Anggota Fraksi PKS Kota Yogya Triyono Hari Kuncoro, berharap kejurusan Pemkot dalam hal informasi tentang data mutakhir yang valid. Selain itu diimbangi dengan *testing* cepat dan akurat, penambahan jumlah shelter atau kapasitas tempat merawat pasien dan hal lain berkaitan dengan penanganan pasien positif Covid-19.

"Di sisi lain penegakan aturan protokol kesehatan perlu digencarkan. Dari laporan Sat Pol PP masih banyak warga yang beraktivitas di ruas jalan utama tidak memakai masker bahkan tidak membawa dengan berbagai alasan dan jumlahnya ratusan. Restoran, tempat makan yang ramai pengunjung pun tidak menggunakan masker. Begitu juga di pasar dan warung-warung kampung banyak yang ti-



Triyono Hari Kuncoro

KR-Istimewa

tidak mengindahkan protokol kesehatan," urai Kuncoro.

Langkah Sat Pol PP yang akan bekerja sama dengan kepolisian dan TNI patut diapresiasi dan didukung dana yang cukup. Penegakan aturan harus dipertegas dengan sanksi yang mendidik, sehat atau senang.

"Setiap unit usaha juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau diharuskan *rapid test* ya semua. Menurut saya ini menjadi faktor yang sangat penting di tengah upaya pemulihan ekonomi yang tidak bisa dihindari juga," imbuhnya.

Pemkot harus benar-benar mendahulukan keselamatan warga sehingga alokasi dana penanganan Covid-19 diberi porsi lebih. "Hal ini sebagaimana yang saya sampaikan pada pandangan umum fraksi terkait perubahan APBD 2020," tandasnya.

Kejelian Pemkot sangat dibutuhkan dalam rangka memutus rantai penularan. "Bahkan jika diperlukan kita mundur ke bulan April selama dua pekan kembali *Work From Home*, pembatasan tempat buka usaha, pasar dan sebagainya dengan harapan peluang penyebaran virus bisa diminimalisasi," tegas Kuncoro. (Dhi)-d